

BAB III

SITUASI DAN KONDISI PENDIDIKAN PEREMPUAN DI BANDUNG

3.1 Kondisi Pendidikan Masa Hindia Belanda di Bandung Abad 19

Kota Bandung pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan sebuah *gemeente* (setingkat kotapraja) yang berada di bawah keresidenan bernama “*Preanger Regentschappe*”. Kota Bandung merupakan kota modern pada masa kolonial dibandingkan kota-kota lainnya di Priangan, hal itu dikarenakan pesatnya kemajuan infrastruktur, laju perekonomian sebagai kawasan pariwisata, dan penghasil komoditas perkebunan.¹

Pada masa awal kependudukan Hindia Belanda di Nusantara, kondisi pendidikan pasca kedudukan VOC masih tertinggal karena pada saat itu tujuan adanya pendidikan hanya untuk kepentingan Belanda saja dan pendidikan yang didirikan oleh VOC masih berbasis agama dan kedaerahan. Barulah ketika Hindia Belanda berkuasa mereka memikirkan perkembangan di bidang pendidikan, dasarnya karena mereka membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk membantu meningkatkan usahanya dalam mengeksploitasi sumber daya alam di Nusantara.

Daendels mulai memikirkan pendidikan bagi rakyat yang tujuannya masih untuk kebutuhan Belanda, Daendels kemudian memerintahkan kepada para Bupati di Pulau Jawa untuk mengadakan pengajaran di kalangan rakyat. Pada masa itu, Daendels memerintahkan agar setiap distrik memiliki sekolah di tiap

¹ Yulianto, 2020, hlm. 2.

masing-masing daerah yang berbasis adat istiadat, undang-undang, dan pokok-pokok pengertian keagamaan khusus untuk agama Islam.²

Sarana pendidikan seperti sekolah di Bandung sebelum adanya politik etis tidak begitu banyak, hanya ada sekolah berbasis agama yang mudah untuk diikuti oleh semua kaum pribumi. Sistem pendidikan di Priangan salah satunya di Tasikmalaya dibedakan menjadi dua kategori yaitu pendidikan non formal yang dilakukan di pesantren dan pendidikan formal yang dilakukan di sekolah menggunakan model barat. Sistem pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Bandung dan Sukabumi pada tahun 1800 sudah dilaksanakan oleh Daendels, namun system tersebut berjalan secara lambat.³

Ide pendidikan yang dicetuskan oleh Daendels tersebut tidak berhasil dilaksanakan dengan baik. Alasan kegagalannya karena tidak adanya dana khusus untuk menyelenggarakan pendidikan dan kekuasaannya di Pulau Jawa jatuh ke tangan pemerintah Inggris, sehingga perintah untuk mendirikan sekolah rakyat tidak terpenuhi. Pada tahun 1811 kekuasaan jatuh ke tangan Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Standford Raffles sehingga pembaharuan di bidang pendidikan mengikuti kebijakan dari Raffles. Namun sayangnya, Raffles justru tidak melakukan kemajuan di bidang pendidikan dan terkesan lebih mengabaikan pendidikan.⁴

Pada tahun 1818 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah

² Makmur, dkk., 1993, hlm. 57.

³ Kusmayadi, 2018, hlm. 147.

⁴ Syahrudin dan Heri, 2019, hlm. 36.

rendah termasuk untuk wilayah Bandung. Namun ternyata isi dari peraturan umum tersebut sedikit sekali ditujukan untuk pendidikan kaum Bumiputra justru lebih menekankan pendidikan bagi orang-orang Belanda.⁵ Keadaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak bersungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan rakyat Pribumi. Pemerintah Hindia Belanda justru mendiskriminasikan pendidikan bagi kaum pribumi dengan menggolongkan sekolah hanya untuk orang-orang Belanda.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pada tahun 1817 dibuka sekolah pertama untuk anak-anak Eropa yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS) dengan sistem pendidikan bercermin kepada sekolah dasar yang ada di Negeri Belanda. Tahun 1920 sekolah ELS dikembangkan menjadi 7 cabang yaitu Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Gresik, dan 2 sekolah di Batavia. Namun pada tahun 1826, pemerintah melakukan upaya penghematan sehingga kebutuhan pendidikan dan pengajaran disederhanakan. Akibatnya, sekolah-sekolah yang ada hanya bisa dinikmati oleh anak-anak Belanda adapun bagi anak-anak Indonesia hanya bagi pemeluk Nasrani. Nasib rakyat pribumi yang lain masih belum diperhatikan oleh pemerintah sehingga sekolah-sekolah tersebut tidak bisa diikuti oleh rakyat umum.

Pada tahun 1830 kekuasaan di Indonesia beralih ke tangan Gubernur Jenderal Van Den Bosh yang terkenal dengan sebutan “Bapak *cultuurestelsel*”. Demi kelancaran tanam paksa maksa dibutuhkanlah tenaga-tenaga pekerja terdidik sehingga pendidikan bagi kaum pribumi dan Eropa ditingkatkan. Sejak

⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

tahun 1833 sampai 1902 jumlah sekolah dasar semakin berkembang. Namun tetap saja pada prakteknya sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak Belanda sehingga kaum pribumi tetap minoritas. Di samping itu, sekolah rendah ELS justru semakin menurun akibat murid-murid yang ada berasal dari keturunan campuran yang menggunakan bahasa melayu sehingga pelajaran sulit diterima dan dimengerti. Ada pula sekolah Rendah Eropa lainnya yang khusus untuk pria didirikan oleh Ny. Gronovius.

Pada tahun 1863 dibuka *Hogere Burger School* (HBS) di Jakarta yang merupakan sekolah tingkat lanjutan setelah peserta didik menempuh HIS atau ELS, HBS kemudian didirikan di Bandung tahun 1915. Sasaran dari sekolah ini yaitu untuk anak-anak Belanda atau golongan bangsawan yang sudah menyekolahkan anaknya ke ELS kelas satu. Syarat masuk HBS yaitu harus mengikuti ujian masuk dan juga harus bisa berbahasa Perancis.⁶ Awal mulanya HBS ini hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan tidak menerima perempuan, alasannya karena pada saat itu terdapat banyak pro dan kontra dalam menyekolahkan anak perempuan. Namun akibat banyaknya pertentangan maka tahun 1891 anak-anak perempuan diperbolehkan mendaftar ke sekolah HBS.

Pada tahun 1866 di Bandung dibuka Sekolah Pendidikan Guru atau *Hollandsch – Inlandsche Kweekschool* (HIK) yang dikenal dengan sebutan Sekolah Raja. Semula bahasa pengantarnya yaitu bahasa Melayu namun sejak tahun 1871 bahasa pengantarnya berubah menjadi bahasa Belanda. Adanya

⁶ Sultani, 2020, hlm. 96.

HIK di Jawa Barat diharapkan dapat menjadikan kondisi pendidikan di Jawa Barat berkembang karena adanya tenaga guru untuk mengajar. HIK Bandung kemudian berkembang cukup pesat sampai tahun 1941 dengan mengeluarkan 70 angkatan guru-guru bumi putera, khususnya guru-guru orang sunda.⁷

Pada tahun 1873 dibuka sekolah untuk anak-anak Indonesia atau Bumiputra yang terbagi menjadi dua kategori. Pertama, Sekolah Kelas Satu atau *De School der Eerste Klasse*. Sekolah ini didirikan di ibukota keresidenan, kabupaten, kewedanaan, dan pusat-pusat kota perdagangan. Kedua, Sekolah Kelas Dua atau *De Schoolen der Tweede Klasse*. Sekolah ini didirikan di kewedanaan-kewedanaan atau distrik sehingga sering disebut sekolah distrik.⁸ Sasaran dari kedua sekolah tersebut berbeda, Sekolah Kelas Satu hanya diperuntukkan bagi orang-orang kalangan priyayi atau bangsawan, orang-orang terhormat, atau tokoh-tokoh terkemuka. Sedangkan Sekolah Kelas Dua dapat diikuti oleh masyarakat umum. Lama belajar yang ditempuhpun berbeda, Sekolah Kelas Satu selama 3 tahun dengan bahasa Malaysia dan bahasa daerah namun lama kelamaan menjadi bahasa Belanda. Sedangkan Sekolah Kelas Dua dapat ditempuh selama 5 tahun untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Selanjutnya, dibuka pula Sekolah Desa dengan lama 3 tahun.

Pada tahun 1878 pemerintah membuka sekolah untuk bangsawan di Tatar Sunda yaitu *Hoofdenschool*, sekolah tersebut dikhususkan untuk anak-anak pegawai pribumi dan tokoh masyarakat terkemuka atau dikenal dengan Sekolah

⁷ Ekajati, 1998, hlm. 60-61.

⁸ Makmur, dkk., 1993, hlm. 66.

Menak untuk menjadi tenaga administrasi pemerintahan kolonial. Sesuai dengan peruntukannya, sekolah ini tidak bisa dimasuki oleh kalangan biasa karena hanya dikhususkan bagi kaum *menak* priangan saja. Tahun 1900 sekolah ini berganti menjadi OSVIA. Kemudian pemerintah membuka sekolah tingkat menengah untuk mendidik calon-calon pegawai pribumi rendah yaitu Sekolah Pamong Praja dengan sebutan MOSVIA.⁹

Pada tahun 1900 muncul pengaruh baru dari seorang tokoh Belanda bernama Van Deventer yang terkenal dengan istilah Politik Etis. Politik Etis merupakan usaha untuk mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Van Deventer mengusung Politik Etis dengan tiga cara yaitu membangun irigasi di daerah-daerah pertanian/perkebunan, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ia merasa bahwa rakyat pribumi sudah sangat banyak membantu kesejahteraan bangsa Belanda, maka ia menganggap hal itu menjadi hutang bangsa dan sudah sepantasnya bangsa Belanda melakukan balas budi kepada bangsa Indonesia. Akibat dari adanya Politik Etis maka pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa perbaikan di bidang pendidikan seperti memberi corak dan sifat ke-Belandaan pada Sekolah Kelas Satu.

Mata pelajaran di Sekolah Kelas 1 ditambahkan dengan pelajaran bahasa Belanda untuk kelas 3 sampai kelas 5 sementara di kelas 6 dijadikan bahasa pengantar. Bahasa Belanda menjadi mata pelajaran penting pada saat itu tujuannya agar memudahkan dalam berkomunikasi dan rakyat pribumi lebih

⁹ Kusmayadi, 2018, hlm. 149.

mudah dalam memahami kehendak Pemerintah Belanda. Tahun 1914 Sekolah Kelas Satu dijadikan HIS (*Hollands Inlandse School*) dan menjadi suatu bagian pengajaran rendah barat. Bagi kaum pribumi yang bukan kalangan bangsawan, HIS merupakan harapan dalam meningkatkan derajat sosial karena sebelum adanya Politik Etis sekolah ini hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan atau keturunan Priyayi.

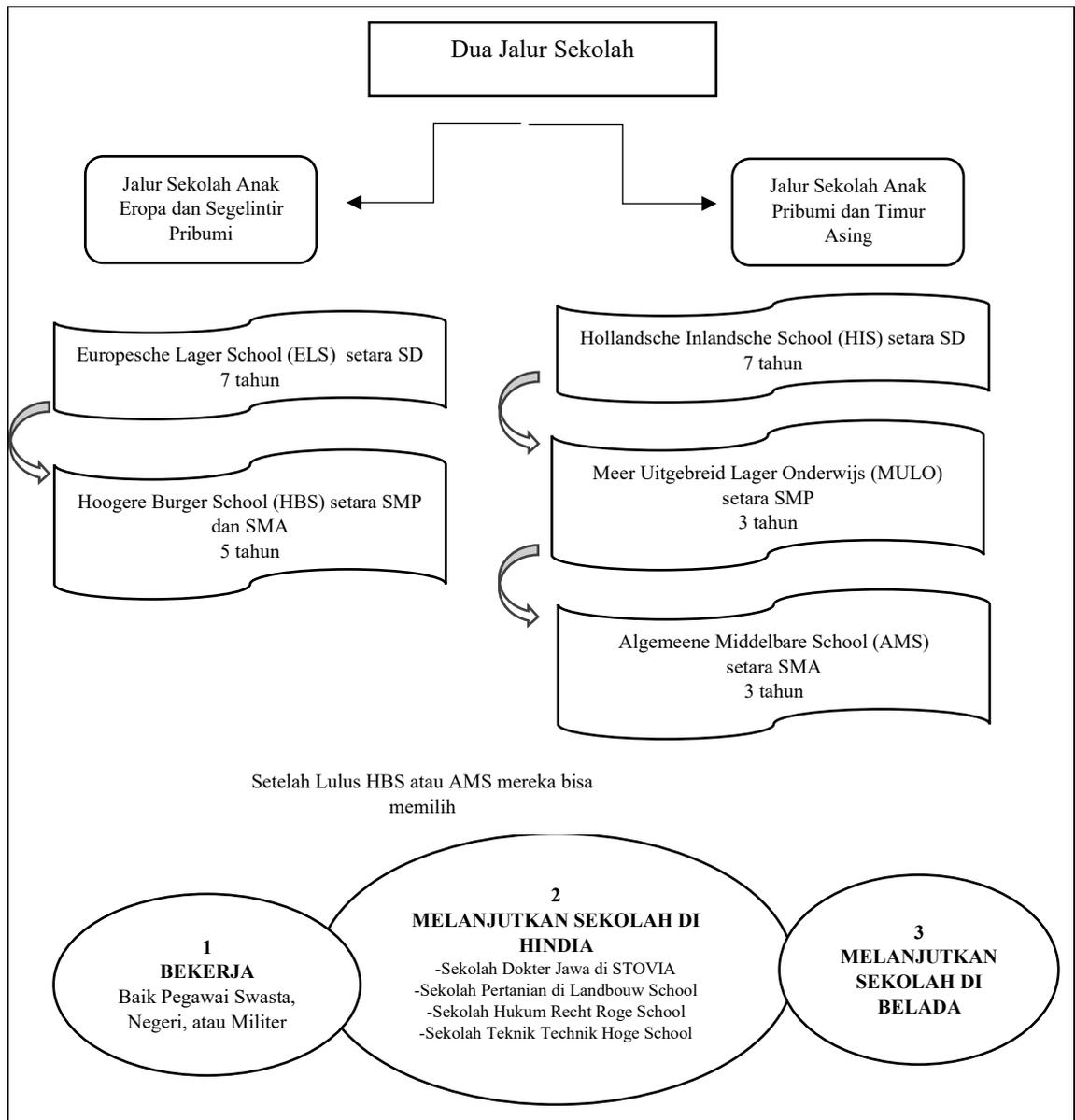
Pendidikan HIS memiliki tiga kategori dalam menyeleksi siswa-siswi yang masuk ke HIS yaitu 1) Kategori A untuk kaum bangsawan, pejabat tinggi, dan pekerja swasta kaya yang berpenghasilan bersih lebih dari 75 gulden tiap bulannya; 2) Kategori B untuk orang tua yang tamatan sekolahnya MULO dan *Kweekschool*; 3) Kategori C untuk pegawai, pengusaha kecil, militer, petani, nelayan, dan orang tua yang pernah mendapatkan pendidikan HIS. Kategori A dan B merupakan golongan kaum atas yang dijadikan prioritas untuk masuk ke HIS sedangkan kategori C merupakan golongan rendah ke bawah.¹⁰ Selain itu pemerintah juga mendirikan sekolah lanjutan.

Tamatan dari HIS kemudian dilanjutkan di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang mulai dibuka tahun 1914 dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah lanjutan umum setelah sekolah-sekolah rendah sebelumnya sebenarnya sudah ada namun pembelajarannya serigkali disatukan dengan sekolah kejuruan. Sekolah MULO pada saat itu masih sedikit, namun mulai tahun 1917 mulai menyebar ke Surabaya, Madiun, Kediri, Semarang, Malang, Magelang,

¹⁰ Prayudi, dan Salindri, 2015, hlm. 25.

Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Bandung, Medan, Makasar, dan Padang.¹¹ Selanjutnya lulusan dari MULO dapat dilanjutkan ke Algemeene Middelbare School (AMS) yang dibuka mulai tahun 1919. AMS setara dengan Sekolah Menengah Atas yang dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. AMS pertama kali di buka di Yogyakarta dengan nama AMS *Afdelling B* (Bagian Ilmu Pasti dan Alam), kemudian tahun 1920 di buka di Bandung. Pendidikan masa Kolonial ditujukan untuk kemajuan rakyat Pribumi dan Eropa dengan harapan dapat memakmurkan pemerintah Belanda. Namun di sisi lain, hal itu positif untuk perkembangan rakyat Pribumi agar bisa melepaskan diri dari belenggu kebodohan dan penjajahan. Walaupun sekolah sudah ada namun tetap saja selalu ada rakyat rendah yang tidak bisa menempuh pendidikan dengan berbagai alasan lainnya.

¹¹ Makmur, dkk., 1993, hlm. 80.



Gambar 3.1
ALUR SEKOLAH MASA HINDIA BELANDA
Sumber: <https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbV>

3.2 Situasi dan Kondisi Pendidikan Perempuan di Bandung

Kedudukan pendidikan bagi perempuan dari zaman ke zaman menunjukkan adanya perubahan, baik itu dilingkup daerah maupun di lingkup nasional. Hal

itu didasari dari gagasan-gagasan serta aturan-aturan dari pemerintah untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kajian sejarah, perempuan pernah mendapatkan berbagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam ilmu kehidupan, seperti di Jawa Barat terdapat cerita-cerita rakyat yang dikenal sebagai peranan Ratu. Dalam cerita pantun Lutung Kasarung misalnya Sunan Ambu adalah Batari yang berkuasa di Kahyangan, putranya Lutung Kasarung atau Guru Minda merupakan suami dari Ratu Purbasari. Ratu Purbasarilah yang mengajarkan ilmu bertani padi sehingga Sang Ratu berhak menjabat sebagai Raja sedangkan suaminya bertidak sebagai pendamping.¹² Keadaan demikian sudah membuktikan bahwa derajat seorang perempuan mampu memberikan pengaruh besar bagi kehidupan.

Seiring berjalannya waktu, pengaruh feodalisme mempengaruhi kedudukan perempuan sunda. Feodalisme merupakan salah satu akar dari kemunduran posisi perempuan di dalam masyarakat yang bermula berkedudukan sebagai subjek kemudian berubah menjadi objek. Dalam bahasa sunda perempuan selalu lekat dengan “*dapur, sumur, kasur*” yang memiliki makna bahwa perempuan itu hanya dikhususkan untuk menjalankan kewajiban memasak dan segala urusan di dapur, kemudian mencuci pakaian di sumur, dan melayani suami dengan baik sesuai kewajibannya di luar urusan dapur dan sumur.

Keadaan demikian membuat pola pikir masyarakat terhadap perempuan sangat sempit sekali jika dilihat dari tiga kewajiban itu. Ungkapan itu ternyata sudah sangat lekat sekali dengan perempuan dari zaman dahulu yang

¹² Wiriaatmadja, 1986, hlm. 26.

berdampak negatif terhadap perkembangan perempuan. Selain ungkapan tiga kewajiban tadi, adat dan agama yang bertentangan dengan konsep *modern* juga sangat membatasi perkembangan perempuan. Salah satu dampak yang terasa oleh perempuan yaitu di bidang pendidikan.

Perempuan dinilai tidak membutuhkan pendidikan karena ilmunya tidak akan terpakai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan jika perempuan sekolah yang ada hanya membebani orang tua untuk membayar biaya sekolah. Dalam segi adat, terdapat beberapa kebiasaan seperti perkawinan dibawah umur (kawin gantung), kawin paksa, penolakan atau perceraian sepihak yang merugikan pihak perempuan. Dalam segi agama ketika awal kedatangan agama Islam, pandangan Arab menganggap bahwa derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki.¹³ Stigma-stigma tersebut sangat lama sekali lekat dengan perempuan, sampai akhirnya muncul tokoh-tokoh perempuan yang ingin mendobrak kedudukan perempuan di daerah-daerahnya seperti R.A. Kartini, R.A. Lasminingrat, Rd. Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dll.

Adat leluhur mengenai kodrat perempuan tidak mudah dilepaskan, terbukti dengan perjuangan-perjuangan tokoh perempuan yang ingin memajukan derajat perempuan melalui pendidikan, salah satunya yaitu Raden Dewi Sartika di Priangan. Kedudukan perempuan pada masa perjuangan Raden Dewi Sartika masih sangat kental sekali dengan adat yang dipatuhi oleh seluruh masyarakat, masyarakat menganggap bahwa jauh sebelum Raden Dewi Sartika lahir perempuan itu sudah ditakdirkan mengurus suami, anak, dan rumah. Bagi

¹³ *Ibid.*, hlm. 27.

masyarakat, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang pintar mengurus dapur seperti memasak, sehingga anak dan suaminya terjamin tidak kelaparan.¹⁴ Jadi bagi mereka, untuk apa perempuan bersekolah jika yang nantinya akan dikerjakan perempuan hanya urusan keluarga saja. Mereka sangat takut apabila mereka menentang adat yang diwariskan orang tua dan leluhurnya sejak lama.

Kedudukan pendidikan bagi perempuan sunda saat itu sangat dianggap sepele bahkan tidak dianggap memiliki makna besar bagi kehidupan. Menempuh pendidikan bagi perempuan saat itu dianggap hanya buang-buang waktu saja. Anak gadis pada zaman dahulu ketika menginjak usia 12 tahun akan segera dipingit oleh orang tuanya. Ketika dipingit, perempuan akan diajarkan bagaimana mengurus tempat tidur dan dapur sambil menunggu hari pernikahan tiba. Sehingga, menyekolahkan anak perempuannya sama dengan menunda pernikahan anak perempuannya. Jika rakyat biasa mempermasalahkan adat dan ketidak mampuan ekonomi untuk menyekolahkan anak perempuannya, kaum bangsawan yang secara ekonomi mampu pun tetap memegang teguh untuk mempertahankan adatnya.¹⁵

Pandangan kaum bangsawan, menyekolahkan anak perempuan dianggap perbuatan tabu dan merugikan. Banyak yang berkeyakinan jika anak perempuan menempuh pendidikan, maka urusan perjodohan akan sulit dilakukan karena kemungkinan anaknya akan menolak dengan dalih memiliki pilihan sendiri.

¹⁴ Asura, 2019, hlm. 216.

¹⁵ Wiyatmi, 2013, hlm. 1.

Bahkan bagi kebanyakan orang tua mereka merasa khawatir, jika anak perempuan sekolah maka sedikit demi sedikit pengaruh dan kewibawaan sebagai orang tua akan menurun di mata anaknya.¹⁶ Perspektif-perspektif masyarakatlah yang membuat pendidikan sulit sekali untuk masuk ke kehidupan perempuan. Setiap keluarga memiliki penilaian dan kepercayaan adat yang berbeda-beda dan kebanyakan menjurus ke arah negatif bagi perkembangan perempuan.

Menurut Raden Dewi Sartika, beragamnya penilaian masyarakat tentang penolakan pendidikan bagi perempuan disebabkan karena mereka tidak tahu manfaat dari pendidikan. Mereka terlalu berpikir sempit dan terlalu berputar di urusan “*dapur, sumur, kasur*” itu. Menurut Dewi Sartika, kebanyakan orang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah karena meskipun pintar tetapi derajatnya tidak akan lebih tinggi dari laki-laki. Perempuan hanya perlu menjadi orang baik, bisa memasak nasi, bisa beres-beres rumah untuk melayani suaminya. Adapun jika nanti perempuan ingin menulis, perempuan bisa meminta suaminya untuk mengajarkannya.¹⁷

Ada juga yang beranggapan bahwa percuma perempuan disekolahkan, ada yang sudah pintar nenulis pun suka digunakan membuat surat yang tidak baik yang berakibat buruk bagi dirinya, lebih baik perempuan diam di rumah dan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Sedangkan dimata santri, anggapan perempuan sekolah itu salah. Bagi mereka, perempuan itu bukan

¹⁶ Asura, 2019, hlm. 247.

¹⁷ Sartika, 1912, hlm. 17.

disekolahkan tetapi seharusnya disuruh mengaji saja, belajar rakaat-rakaat shalat, belajar 20 sifat Nabi, tasaúf, supaya menjadi baik dan bisa memutus hawa nafsunya. Ada juga anggapan santri yang terdengar oleh Kanjeng Bupati Bandung bahwa kaum perempuan itu tidak boleh terlihat oleh kaum laki-laki lain, hanya boleh terlihat oleh suaminya dan keluarganya. Sehingga, tidak baik jika perempuan di sekolahkan.¹⁸

Pendapat-pendapat tersebut yang menurut Raden Dewi Sartika diyakini oleh masyarakat-masyarakat luas tentu tidak ada yang salah, namun bagi Raden Dewi Sartika perempuan ataupun laki-laki itu tidak cukup hanya menjadi orang yang baik saja tetapi harus juga memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan kehidupan terlepas dari marabahaya. Baginya, tidak menempuh sekolah belum tentu akan menjadi baik. Tetapi, jika sekolah setidaknya akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kedudukan pendidikan perempuan pada zaman dahulu sampai masa perjuangan Raden Dewi Sartika sangat tabu sekali, terkekang oleh adat, dan terlalu sempit mengartikan ajaran agamanya. Padahal manfaat pendidikan bagi perempuan tentu akan menjadi sangat bagus bagi perempuan dalam menjalankan kewajibannya di rumah maupun diluar rumah.

Kedudukan pendidikan bagi perempuan di tanah sunda pada masa itu sangat susah untuk diperbaiki padahal saat itu sudah ada tokoh perempuan yaitu R.A. Lasminingrat yang membuka sekolah bagi anak-anak di Priangan. Adanya tokoh R.A. Lasmningrat dari Garut yang ingin memperbaiki derajat perempuan

¹⁸ *Ibid.*,

melalui bidang pendidikan membuktikan bahwa pada saat itu sebenarnya pendidikan bagi perempuan di Priangan sudah dirasakan manfaatnya, salah satunya oleh R.A. Lasminingrat.

R.A. Lasminingrat sudah memperlihatkan bahwa permasalahan pendidikan di tanah Priangan harus diatasi dan diperbaiki. Beliau kemudian menyusun buku-buku seperti buku cerita yang tujuannya untuk menambah pengetahuan di sekolah-sekolah pribumi. Beliau berjuang dan mendirikan sekolah bagi perempuan tujuannya agar derajat perempuan bisa meningkat dan terlepas dari adat budaya yang membelenggu setiap perempuan sunda. Jadi sebenarnya pendidikan perempuan di sunda saat itu bukan berarti belum ada, hanya saja perempuan-perempuan sunda di tanah Priangan yang merasakan pendidikan masih sedikit sekali.

Hadirnya Raden Dewi Sartika yang berpikiran maju mengenai kebutuhan perempuan, telah melahirkan semangat emansipasi atau semangat feminisme bagi perempuan sunda untuk keluar dari keterbelengguan adat. Menurut penulis, sedikit demi sedikit kaum perempuan sunda di lingkungan Raden Dewi Sartika saat itu sudah mulai tertarik untuk memperbaiki nasib masa depannya. Namun di sisi lain, mereka merasa berat jika harus menentang adat kebiasaan di lingkungannya.